



TESIS

Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Sanksi
Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta
(Studi Kasus PTUN Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT)

Disusun oleh:

STEVIE CHRISTOPHER GUGGITZ
NIM.217202016

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS
SANKSI YANG DIBERIKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS
WILAYAH NOTARIS DKI JAKARTA
(STUDI KASUS PTUN NOMOR 190/G/2020/PTUN.JKT)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara

Oleh:

STEVIE CHRISTOPHER GUGGITZ

NIM: 217202016

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023

Pengesahan

Nama : STEVIE CHRISTOPHER GUGGITZ
NIM : 217202016
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Sanksi Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta (Studi Kasus PTUN Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT)
Title : Legal Protection Against Notaries for Sanctions Awarded by the Supervisory Council of the DKI Jakarta Notary Region (Case Study PTUN Number 190/G/2020/PTUN.JKT)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 25-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 25-Januari-2023

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : STEVIE CHRISTOPHER GUGGITZ
NIM : 217202016
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas
Sanksi Yang Diberikan Oleh Majelis
Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta (Studi
Kasus PTUN Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 15-Desember-2022

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H.,
M.M., Dr., M.Kn., Prof.
NIK/NIP: 10292010



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Rahmat-Nya yang berlimpah, Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Sanksi Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta (Studi Kasus PTUN Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT)”**.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi syarat untuk lulus dan mencapai gelar S2 (Strata Dua) Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum di Universitas Tarumanagara. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari tahap sempurna namun Penulis mengharapkan bahwa tesis ini dapat menjadi berguna di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini, Penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu dan keluarga saya yang selalu yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doa yang tulus kepada penulis
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku dosen pembimbing tesis yang selalu sabar mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H. selaku Ketua Program S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Seluruh Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah menyumbangkan ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung sedari awal sampai dengan diselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Seluruh Staff dan Karyawan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
6. Bapak Sulaiman Tjoa, S.H., Evita Febryati Rosalina, S.H., Zikri Yusman Arivin, S.H., dan Leo Augustinus Christianto, S.H. dan juga teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan semangat pantang menyerah, dukungan moral, doa, dan menyediakan waktu kepada penulis untuk berkonsultasi dikala mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tesis ini

Akhir kata, Penulis hanya bisa berharap kepada Tuhan yang Maha Esa semoga Tuhan berkenan membalas seluruh kebaikan dari semua pihak yang telah membantu Penulis dan semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Jakarta, 5 November 2022



Stevie Christopher Guggitz

DAFTAR ISI

Bagian Awal

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii

Bagian Utama

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Definisi Operasional.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, KEWENANGAN, KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM	22
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	22
B. Teori Kewenangan.....	44
C. Teori Keadilan.....	53

D. Teori Kepastian Hukum	57
E. Teori Perlindungan Hukum.....	62
BAB III PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	
NOMOR 190/G/2020GPTUN.JKT TANGGAL 23 FEBRUARI 2021	70
A. Kasus Posisi.....	70
B. Amar Putusan	74
C. Fakta Hukum	76
D. Hasil Wawancara.....	90
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS	
SANKSI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DKI JAKARTA	
A. Kepastian Hukum Akta Cessie Notaris Yang Dijadikan Dasar Permohonan PKPU	103
B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diberikan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris	121
Bagian Akhir	
BAB V PENUTUP	144
A. Simpulan.....	144
B. Saran.....	148
Daftar Pustaka.....	151
Lampiran	
PUTUSAN NOMOR 190/G/2020/PTUN.JKT	157

ABSTRAK

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Sanksi Yang
Diberikan Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta
(Studi Kasus PTUN Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT)

Nama : Stevie Christopher Guggitz

NIM : 217202016

Kata Kunci : Cessie, Notaris, Perlindungan Hukum, dan Kewenangan.

Isi :

Penelitian ini dilatarbelakangi perihal kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT, yaitu permasalahan yang terjadi pada Notaris Gunawan Tedjo yang dilaporkan ke MPWN oleh PT. KCN selaku debitur karena merasa telah dirugikan dengan adanya akta cessie, menurut debitur, seharusnya Notaris melakukan konfirmasi dulu kepada debitur sebelum membuat akta cessie tersebut, dan juga dengan dibuatnya akta cessie tersebut debitur telah dilaporkan PKPU oleh tuan Juniferts Girsang selaku kreditur. Dalam UUJN-P sanksi berupa peringatan tertulis tidak dapat dilakukan upaya hukum. Rumusan masalah: 1)Bagaimana kepastian hukum akta cessie Notaris yang dijadikan dasar permohonan PKPU? 2)Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris? Peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif, sifat dari penelitian adalah deskriptif analitis, dengan alat pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan:1)Tidak ada pendapat yang mengatakan kalau kreditur mau mengalihkan hak tagih terhadap debitur, maka ia harus mengalihkan seluruh tagihan itu sebagai satu kesatuan. Selama akta cessie telah dibuat sesuai dengan peraturan ketentuan yang terdapat dalam pasal 613 jo. Pasal 584 KUHPerdara maka akta cessie menjadi sah dan mengikat bagi debitur terhadap krediturnya. 2)UUJN mengatakan Notaris berkewajiban merahasiakan mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan yang diperoleh sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai badan atau jabatan TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan surat keputusan atau ketetapan yang berkaitan penjatuhan sanksi kepada Notaris, dengan demikian surat keputusan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan TUN sebagai sengketa TUN.

ABSTRACT

*Title : Legal Protection Against Notaries for Sanctions Awarded by the
Supervisory Council of the DKI Jakarta Notary Region (Case Study
PTUN Number 190/G/2020/PTUN.JKT*

Name : Stevie Christopher Guggitz

NIM : 217202016

Keyword : Authority, Notary, Certificate of Inheritance, Land Rights

Contents :

Research is motivated on Court Judgment Number 190/G/2020/PTUN.JKT, the problem that occurred with Notary Gunawan Tedjo who were reported to MPWN by PT. KCN as debtor because they felt been harmed by the cessie that has been made, according to the debtor, Notary should confirm to the debtor first before making the cessie, and therefore, the debtor has been reported PKPU by Juniferts Girsang as their creditor. In UUJN-P sanctions in the form of written law cannot be taken legal action. Problems: 1) How is the legal certainty of cessie which is used as the basis for PKPU? 2) What is the legal protection for Notaries who are sanctioned by the MPW? Researcher uses normative legal research, the nature of the research is analytical descriptive, by collecting primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. Conclusions: 1) There is no consensus that if the creditor wants to transfer billing rights to the debtor, then they must transfer the entire bill. As long as the cessie has been made according to Article 613 jo. Article 584 KUHPperdata, the cessie becomes legal and binding for the debtor and creditor. 2) UUJN states that Notary is obliged to keep secret the deed they made and the information they obtained in accordance with their oath, unless the law provides otherwise. MPW in position as TUN, has the authority to impose sanctions on Notary, thus the decree of MPW can be used as the object of a lawsuit by Notary to the Administrative Court state administrative dispute.